

ARTIKEL HASIL PENELITIAN

(PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL)

MODEL PETA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KAB./KOTA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Disusun oleh:

Dr. H. Johar Permana, MA.,
Dr. Danny Meirawan, M.Pd.,
Cepi Triatna, S.Pd., M.Pd.



Dibiayai oleh DIPA UPI, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Strategi Nasional Batch I, dengan SK Rektor UPI Nomor: 1145/HM/PL/2009
Tanggal 27 Februari 2009

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOVEMBER, 2009

MODEL PETA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KAB./KOTA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Oleh:

Dr. H. Johar Permana, MA., Dr. Danny Meirawan, M.Pd., Cepi Triatna, S.Pd., M.Pd.

Abstrak

PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengungkapkan yang menjadi urusan pemerintah, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Namun berapa proporsi untuk masing-masing dalam pembiayaan pendidikan ini masih belum diketahui secara jelas. Dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat, baik kategori biaya investasi, operasional, maupun personal. Dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dan kuantitatif penelitian ini melakukan sampling secara purposive dengan kriteria (1) PAD kab./kota ada dalam posisi tinggi, sedang, dan rendah, (2) kondisi sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah. dengan kriteria tersebut didapatkan 12 kab./kota dan 228 responden yang terdiri dari pihak sekolah, dinas pendidikan kab./kota, dan orang tua siswa. Temuan penelitian menunjukkan kecenderungan biaya operasional SD per siswa per tahun mencapai Rp 388,320.92. Di SMP sebesar Rp 503,651.39. Sedangkan di SMA sebesar Rp 1.524.909.00. Biaya investasi di SD per siswa per tahun mencapai Rp 1,473,572.30. Di SMP Rp 1,241,280.59. Di SMA Rp 713.905.000. Biaya personal pada kategori yang sama, di SD sebesar Rp 3,163,450.00. Di SMP mencapai Rp 5,209,300.00. Di SMA mencapai Rp 3.515.000,00. Pemda Propinsi Jabar memiliki peran yang signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Rata-rata pemenuhan biaya operasional oleh Pemda Propinsi Jabar untuk SD mencapai 6,44%, SMP mencapai 25,85% dan SMA mencapai 11,80%.

Kata kunci: *Peta pembiayaan, biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal.*

A. Pendahuluan

Penganggaran pendidikan 20% pada tahun 2009 telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Tekad ini telah ditegaskan oleh Gubernur Ahmad Heryawan pada pidato hari peringatan Kemerdekaan RI Ke-63 Tahun 2008, 17 Agustus 2008 di Lapangan Gasibu Bandung. Lebih jauh PP 48/2008 menjelaskan bahwa dana pendidikan dibagi kepada biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Urusan pemerintah daerah dalam biaya, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Namun berapa proporsi untuk masing-masing dalam pembiayaan pendidikan ini masih belum dirasakan jelas.

Ketidakjelasan ini berdampak pada munculnya ketimpangan pembangunan pendidikan antara masyarakat yang miskin dengan yang kaya dan antara satu kab./kota dengan kab./kota lainnya di Jawa Barat. Dalam konteks tersebut, keadilan dalam pembiayaan pendidikan menjadi angan-angan belaka. Kajian ini secara khusus mencoba memetakan pembiayaan pendidikan antara pemerintah provinsi dan kab./kota di Jawa Barat.

Masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal untuk sekolah dasar (SD) di Jawa Barat? (2) Bagaimana biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal untuk sekolah menengah pertama (SMP) di Jawa Barat? (3) Bagaimana biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal untuk sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Barat? (4) Bagaimana peta pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat dilihat dari biaya operasi, investasi, dan biaya personal?

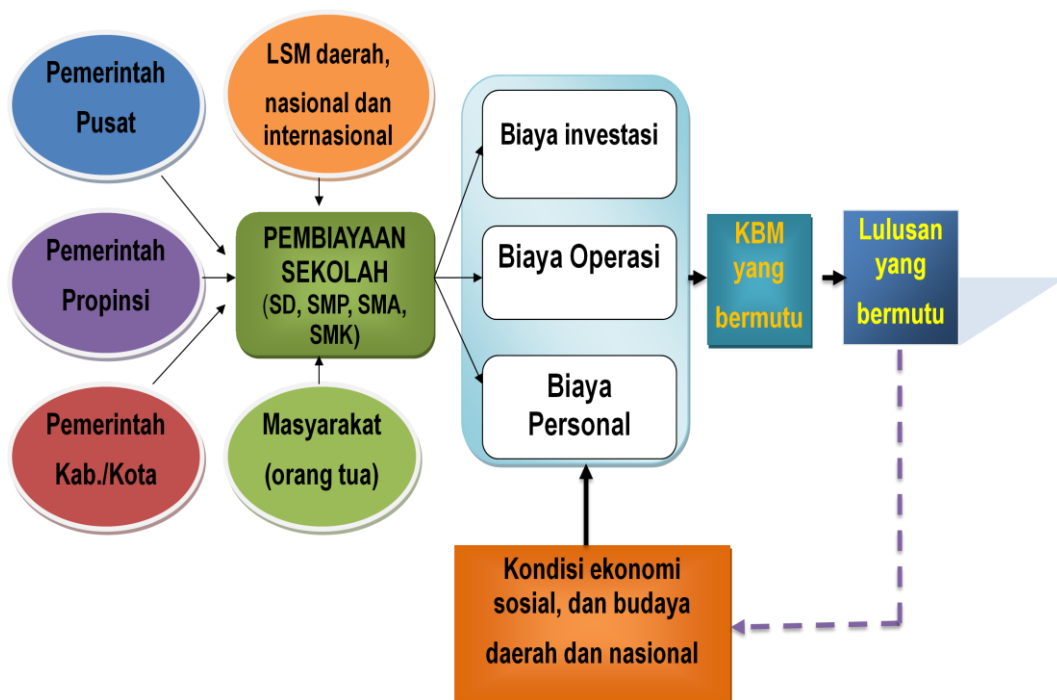
Tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi yang lengkap, valid, dan *up to date* (terkini) mengenai pemetaan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat, baik kategori biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya operasional dengan kejelasan sumber-sumber dan proporsi (persentase) pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar di Jawa Barat, sehingga ada kejelasan posisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah dari APBD Propinsi Jawa Barat untuk masing-masing Kab./kota.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik untuk: 1) Penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah; 2) Penyelenggaraan pendidikan di tingkat kab/kota dan 3) Penyelenggaraan pendidikan di tingkat provinsi. Adapun manfaat penelitian bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah adalah memberikan informasi pengetahuan mengenai komponen-komponen yang harus dibiayai dalam penyelenggaraan sekolah, serta besaran biaya penyelenggaraan sekolah yang berorientasi pada mutu, dan pentingnya keterlibatan orang tua siswa dalam pengelolaan pembiayaan di sekolah.

Untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat kab/kota diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aspek – aspek yang harus ditanggulangi oleh

kab/kota melalui dana bos, serta pentingnya keterlibatan dinas pendidikan kab/kota dalam perencanaan, pengalokasian, evaluasi dan pengendalian pembiayaan oleh sekolah-sekolah yang berada di bawah pengendalian dinas pendidikan kab/kota. Juga memberikan informasi mengenai besaran dana BOS untuk menanggulangi penyelenggaraan SD, SMP, dan SMA baik kategori sekolah bermutu tinggi, bermutu rendah dan bermutu sedang. Sekaligus memberikan informasi mengenai pentingnya penyusunan peraturan atau pedoman pembiayaan pendidikan dasar dan menengah baik pada level mikro (sekolah) maupun pada level makro (kab./kota) untuk memberikan informasi yang jelas mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan sekolah.

Untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat provinsi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai komponen-komponen yang harus dibiayai oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, baik biaya operasional maupun biaya investasi, memberikan informasi mengenai kewenangan dan tanggungjawab pemerintah propinsi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat, dan adanya informasi mengenai perlunya alokasi yang lebih besar untuk subsidi bea siswa pendamping (bos pendamping) bagi penyelenggaraan SD, SMP, dan SMA, khususnya bagi masyarakat miskin di Jawa Barat.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Fokus kajian pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembelajaran. Artinya apa yang dibiayai ditujukan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Semua komponen pembiayaan pendidikan baik yang utama maupun pendukung utama harus diposisikan untuk pencapaian pembelajaran yang bermutu. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang bermutu.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diolah melalui reduksi dan klasifikasi untuk memperoleh simpulan yang bermakna, verifikasi kondisi empirisnya, untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat, relevan, dan visible untuk diimplementasikan. Sedangkan data kuantitatif diolah dengan menggunakan uji presentase/uji kecenderungan (*weighted Mean scored*), penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik yang digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi kecenderungan-kecenderungan pembiayaan pada tingkat sekolah, kab./kota, dan propinsi.

Pengolahan data kuantitatif juga dilakukan dengan mengkalkulasi data-data mikro (sekolah) kemudian diagregasi menjadi data makro pada tingkat kab./kota dan kemudian diagregasi pada tingkat propinsi.

Populasi penelitian sebanyak 26 kab./kota di Jawa Barat. Dengan asumsi homogenitas pada sumber penelitian, maka dilakukan sampling secara purposif dengan kriteria (1) PAD kab./kota ada dalam posisi tinggi, sedang, dan rendah, (2) kondisi sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah. Dengan kriteria tersebut didapatkan 12 kab./kota dan 228 responden yang terdiri dari pihak dinas pendidikan kab./kota, pihak sekolah, dan pihak orang tua siswa. Sekolah terdiri dari SD, SMP dan SMA. Ketiga jenjang sekolah tersebut dikategorikan pada tiga kategori, yaitu sekolah yang bermutu tinggi, bermutu rendah, dan bermutu sedang. Orang tua terdiri dari orang tua siswa di SD, SMP dan SMA. Responden orang tua juga diklasifikasi pada tiga, yaitu: orang tua siswa yang memiliki anak pada sekolah yang bermutu tinggi, bermutu rendah, dan bermutu sedang.

Selain data langsung dari responden yang digali melalui instrumen angket dan pedoman wawancara, peneliti juga menggali data sekunder berupa dokumen mengenai: 1) kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Jawa

Barat, strategi dinas, dan program pembiayaan pendidikan kabupaten/kota di Jawa Barat, 2) Data dan Informasi profil kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kabupaten/kota di Jawa Barat, 3) Kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah pusat, propinsi dan daerah mengenai pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, 4) Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) untuk masing-masing jenjang sekolah.

Permasalahan yang dihadapi dalam penggalan dana adalah tidak semua sekolah dan dinas pendidikan kab./kota mau memberikan dokumen anggaran untuk kepentingan penelitian. Banyak responden tidak mau memberikan dokumen anggarannya. Kondisi ini dapat dipahami, bahwa pihak yang dijadikan sumber penelitian masih khawatir dengan keterbukaan dokumen-dokumen anggaran lembaga kepada berbagai pihak.

B. Temuan dan Pembahasan

Data-data dan informasi yang didapat melalui instrumen, wawancara maupun studi dokumentasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan besaran biaya yang dikeluarkan oleh setiap satuan pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA dengan kategori sekolah bermutu tinggi, bermutu sedang, dan bermutu rendah. Selanjutnya dideskripsikan pembiayaan pendidikan di Propinsi Jawa Barat yang meliputi deskripsi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Temuan penelitian menunjukkan biaya operasional SD bermutu tinggi, sedang dan rendah per siswa per tahun mencapai Rp 760,384.62; Rp Rp 388,320.92; dan 212,624.05 . Di SMP sebesar Rp 1,634,722.26; Rp 503,651.39; dan Rp 241,179.80 Sedangkan di SMA sebesar Rp 2.140.417.00; Rp 1.524.909.00; dan Rp 951.721.00. Capaian biaya investasi di SD, SMP, dan SMA per siswa per tahun pada sekolah yang dikategorikan bermutu tinggi, sedang, dan rendah sebagai berikut: SD: Rp 2,453,846.15; Rp 1,473,572.30; dan 28,190.84. Di SMP: Rp 1,728,367.74; Rp 1,241,280.59; dan Rp 242,834.34. Di SMA: Rp 5.329.500.000; Rp 713.905.000; dan Rp 384.226.500. Biaya personal pada kategori yang sama, di SD sebesar: Rp 11,788,000.00; Rp 3,163,450.00; dan

1,740,000.00. Di SMP mencapai Rp 8,930,000.00; Rp 5,209,300.00; dan Rp 2,720,000.00. Di SMA mencapai: Rp 4.148.000,00; Rp 3.515.000,00, dan Rp 2.020.000,00. Pemda Propinsi Jabar memiliki peran yang signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA). Rata-rata pemenuhan biaya operasional untuk SD mencapai 6,44%, SMP mencapai 25,85% dan SMA mencapai 11,80%.

Table.1
Resume biaya operasional pada sekolah-sekolah yang diteliti

Level sekolah	Sekolah Bermutu tinggi	Sekolah Bermutu Rendah	Sekolah Bermutu sedang
SD	Rp 760,384.62	Rp 212,624.05	Rp 388,320.92
SMP	Rp 1,634,722.26	Rp 241,179.80	Rp 503,651.39
SMA	Rp 2.140.417.00	Rp 951.721.00	Rp 1.524.909.00

Table.2
Perbandingan biaya operasional temuan penelitian dengan berbagai kajian

Level sekolah	Balitbang Depdiknas	Draft BSNP	ICW
SD	1.864.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00
SMP	2.771.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00
SMA	3.612.000,00	2.700.000,00	-

Standar biaya ideal sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pihak pada tabel 2 menunjukkan bahwa biaya operasional pada sekolah-sekolah saat ini di Jawa Barat masih dibawah standar (hasil kajian). Pengalokasian biaya operasional oleh pihak sekolah belum mencerminkan kebermutuan pendidikan. Dalam konteks temuan pembiayaan, biaya operasional pada sekolah-sekolah di Jawa Barat secara umum baru sampai pada pembiayaan pendidikan dengan kondisi minimal.

Table. 3
Perbandingan Persentase Alokasi BIS SD, SMP, da SMA
pada komponen sarana dan prasarana

ITEM BIAYA	% PADA SEKOLAH KATEGORI MUTU TINGGI			% PADA SEKOLAH KATEGORI MUTU SEDANG			% PADA SEKOLAH KATEGORI MUTU RENDAH		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
a. Lahan	11.28	-	97.71	79.90	37.06	56.03	-	0	88.30
b. Bangunan	82.94	13.39	0.53	14.68	48.38	4.37	-	0	2.80
c. Buku	0.14	45.54	1.76	3.98	5.67	39.41	100	100	8.90
d. Alat	5.64	41.07	0	1.44	8.88	0.19	-	0	0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Item biaya pada komponen sarana dan prasarana sekolah diprioritaskan secara variatif untuk setiap jenjangnya didasarkan pada kondisi sekolah. Implikasi penting dari kondisi ini adalah perlu adanya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana berupa lahan, bangunan, buku dan alat untuk setiap jenjang sekolah.

Table 4
Perbandingan biaya pendidikan SD yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per anak per tahun

Jenis Biaya	Mutu Tinggi	Mutu Sedang	Mutu Rendah
Personal	11,788,000.00	3,163,450.00	1,740,000.00
Biaya Operasional	760,384.62	388,320.92	212,624.05
Biaya Investasi	2,453,846.15	1,473,572.30	28,190.84
Rata-rata BOS SD (Pusat, Propinsi, & Kab./Kota)	Rp 550.000,00		
Draft BSNP	Rp 1.300.000,00		
Balitbang Diknas	Rp 1.864.000,00		

Table 5.
Perbandingan biaya pendidikan SMP yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per anak per tahun

Jenis Biaya	Mutu Tinggi	Mutu Sedang	Mutu Rendah
Personal	8,930,000.00	5,209,300.00	2,720,000.00
Biaya Operasional	1,634,722.26	493,153.43	241,179.80

Jenis Biaya	Mutu Tinggi	Mutu Sedang	Mutu Rendah
Biaya Investasi	1,728,367.74	1,241,280.59	242,834.34
Rata-rata BOS SD (Pusat, Propinsi, & Kab./Kota) *)	Rp 508.000,00		
Draft BSNP	Rp 1.800.000,00		
Balitbang Diknas	Rp 2.771.000,00		

*) kasus kota Bandung

Table 6.
Perbandingan biaya pendidikan SMA yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per anak per tahun

Jenis Biaya	Mutu Tinggi	Mutu Sedang	Mutu Rendah
Personal	4.148.000,00	3.515.000,00	2.020.000,00
Biaya Operasional	2.140.417,00	1.524.909,00	951.721,00
Biaya Investasi	5.329.500,00	713.905,00	384.226,50
Draft BSNP SMA	Rp 2.700.000,00		
Temuan Balitbang Diknas	Rp 3.612.000,00		

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Permasalahan yang harus dipecahkan oleh Pemda kab./kota dan Pemda Propinsi adalah bagaimana masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA dapat membiayai berbagai komponen biaya personal, yaitu berupa: (1) alat perlengkapan sekolah, (2) biaya transport PP, (3) uang saku/jajan, (4) biaya ekstrakurikuler, dan (5) biaya bimbingan belajar. Point 4 dan 5 merupakan pilihan. Artinya memungkinkan tidak ada alokasi khusus untuk dua item tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa (Ditjen PUOD, 1993; Trisnawati, dkk, 2001; Supriadi, 2002). Oleh sebab itu, dalam konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman tentang berbagai aspek

pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya di tingkat sekolah.

C. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah:

1. Pemenuhan biaya operasional dan investasi sekolah SD dan SMP saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program bos pusat, ditanggung oleh pemerintah propinsi melalui program bos propinsi, dan kab./kota melalui bos pendamping. Untuk SMA, pemenuhan biaya operasional hanya ditanggung oleh dana BOS propinsi, sedangkan dari pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tidak ada alokasi secara khusus. Untuk biaya investasi, dana didapatkan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, maupun pemerintah daerah kab./kota.
2. Dilihat dari pembiayaan pendidikan nyata saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusi yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, dukungan ini baru mencapai kondisi minimal, belum untuk mendukung penyelenggaraan sekolah yang bermutu. (rincian persentase peran propinsi melalui BO dan BIS).

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Saran Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat: a) Dalam penyusunan anggaran pendidikan seyogyanya ada sinergi antara pemerintahan kab./kota dan propinsi serta pusat untuk penyusunan program-program dalam penyelenggaraan pendidikan beserta biaya yang menyertainya; b) Perubahan paradigma pembiayaan pendidikan mikro dan makro dari konsumsi menjadi investasi; c)

Untuk mendapatkan keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus secara khusus mengalokasikan beasiswa bagi anak dari keluarga miskin; d) Untuk kelancaran perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas dana bos yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, seyogyanya dana-dana operasional dan investasi tidak dialokasikan untuk membiayai komponen biaya yang sama didanai oleh pemerintah pusat melalui dana bos atau program lainnya.

Saran Bagi Pemerintah Kab./Kota: a) Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah di Kab./Kota, seyogyanya pemerintah daerah memenuhi anggaran 20% untuk alokasi biaya pendidikan dari APBD nya masing-masing. Hal ini ditujukan untuk lebih luasnya pemerintah kab./kota dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu; b) Mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dan minimnya PAD yang dimiliki oleh masing-masing kab./kota di Jawa Barat, maka seyogyanya pemerintah daerah kab/kota menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industry untuk turut membiayai pendidikan. Pembiayaan dari dunia industry dapat dialokasikan secara khusus untuk membiaya komponen atau item tertentu dalam biaya operasional atau biaya investasi; c) Untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan, pemerintah daerah kab./kota seyogyanya menyusun rencana pembiayaan pendidikan dengan melibatkan stakeholder pendidikan, menggunakan biaya dengan prinsip transparan, dan melakukan akuntabilitas pendidikan bersama dengan stakeholder; d) Untuk kelancaran pengelolaan pembiayaan pendidikan pada level sekolah (mikro), seyogyanya pemerintah daerah--sebagai pihak yang memiliki kewenangan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah--membuat pedoman mengenai perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas biaya di tingkat sekolah.

Saran Bagi Kepala Sekolah dan Guru adalah: a) Untuk kepentingan perencanaan, penggunaan dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan yang lebih baik di sekolah, sebaiknya sekolah menggunakan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga setiap dana yang dibutuhkan dan dimiliki dapat dikelola dengan lebih baik; b) Dalam system sekolah, orang tua merupakan pelanggan kedua, setelah peserta didik. Akan hal itu, sebaiknya orang tua siswa

selalu dilibatkan dalam berbagai hal terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah; c) Untuk mendapatkan manfaat biaya yang lebih baik, kepala sekolah sebaiknya membuat peta pembiayaan dengan alokasi utama pada dukungan penyelenggaraan KBM yang efektif; d) Untuk kelancaran pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah perlu mengupdate kemampuannya dalam mengelola keuangan, khususnya dalam kemampuan wirausaha dan berbagai informasi kebijakan pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kab./kota.

D. Daftar Pustaka

- Anwar, M. I. 1991. *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun X, 1991: 28-33.
- Caldwell, B. J., Levacic, R. & Ross, K. N. 1999. **The Role of Formula Funding of Schools in Different Educational Policy Contexts**. Dalam Ross, K. N. & Levacic, R. eds., *Needs-Based Resource Allocation in Education via Formula Funding of Schools*. Paris: International Institute for Educational Planning.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2009. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. 2005. *Panduan Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Ditjen PUOD. 1993. *Penelitian dan Pengkajian Satuan Biaya Sekolah*. Buku Panduan: Jakarta: Ditjen PUOD Depdagri.
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Gaffar, M. Fakry. 1991. "Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan". *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun X, 1991: 56-60.
- Hallak, J. 1969. *The Analysis of Education Cost and Expenditure*. Paris: UNESCO.
- Hanushek, Eric A. 1996. *Does Money Matter? The Effect of School Resources on Student Achievement and Adult Success*. Contributors: Gary Burtless - editor. Publisher: Brookings Institution. Place of Publication: Washington, DC.
- Morphet. 1971. *The Economic & Finance of Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- NGA – Center for Best Practice. 2003. *Improving Teaching and Learning by Improving School Leadership*. Issue Brief- September 12, 2003. [Tersedia online: <http://www.nga.org/cda/files/091203LEADERSHIP.pdf>]
- Sartori, M. Barbara 1998. *Resource Allocation and Productivity in Education: Theory and Practice*. Contributors: William T. Hartman - editor, William Lowe Boyd - editor. Publisher: Greenwood Press. Place of Publication: Westport, CT.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah: Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- The Center for Comprehensive School Reform and Improvement. 2009. *Effective Uses of Funding Support for Schools in Need of Improvement*. Issue Brief - September 30 2009. Learning Point Associates in partnership with the Southwest Educational Development Laboratory (SEDL), under contract with the Office of Elementary and Secondary Education of the U.S. Department of Education.
- Thomas, J. A. 197). *The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration*. New York: John Wiley & Sons.
- Trisnawati, N. et. al. 2001. *Pendanaan Pendidikan di Indonesia*. Dalam Jalal, F & Supriadi, D eds. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.